

Uji Emisi Syarat Perpanjang STNK, Tak Lulus Kena Denda Pencemaran

JAKARTA (IM) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkap rencana uji emisi menjadi syarat untuk memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK). Nantinya setiap kendaraan yang telah menjalani uji emisi bakal diberi stiker penanda.

"Kemudian uji emisi lagi itu harus dilakukan nanti bersama-sama Polri, polda, dan pemda. Jadi kita akan lakukan. Caranya adalah diuji emisinya, lalu diberi stiker kalau sudah lulus. Ini akan menjadi syarat untuk perpanjangan STNK," kata Siti di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Siti menjelaskan akan ada sanksi denda yang dijatuhkan apabila kendaraan bermotor tak lolos uji emisi. Siti menuturkan jenis-jenis sanksi akan digodok oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau dia belum lulus emisi. Dia harus kena denda yang namanya denda pencemaran. Denda pencemarannya berupa dan lain-lain ini lagi diproses. Dan kita minta Menteri Dalam Negeri yang menetapkan karena ada undang-undangnya tentang pajak daerah dan lain-lain," ujarnya.

Secara umum, Siti menjelaskan nantinya kendaraan hanya boleh didenda selama dua kali. Apabila lebih dari batasan yang ditetapkan, kendaraan tersebut terancam tak beroperasi.

"Kemudian hanya boleh kena denda dua kali. Jadi kalau udah dua kali kena denda, kali ketiga masih nggak lulus juga, kendaraannya nggak bisa beroperasi. Jadi kita akan melihat kendaraan-kendaraan mana yang bisa beroperasi atau tidak beroperasi," terangnya. ● han

Usut Kasus Korupsi Andhi Pramono, Penyidik KPK Periksa Tiga Saksi

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK mendalami dugaan adanya perintah Andhi Pramono mewajibkan pihak swasta untuk menyetorkan fee karena rekomendasi akses ilegal kepabebaran lewat dua saksi yakni Rudi Hartono dan Untung Sunardi, dengan memeriksa tiga saksi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan kedua saksi tersebut diperiksa pada Rabu 16 Agustus 2023 di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

"Kedua saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah Tersangka AP untuk mewajibkan pihak swasta menyetorkan uang berupa fee karena adanya rekomendasi akses layanan ilegal kepabebaran," kata Ali dalam keterangannya, Jumat

(18/8). Selain Rudi Hartono dan Untung Sunardi, lembaga antirasuah juga telah memeriksa Notaris dan PPAT Nuzmir Nazorie. Adapun pemeriksaan itu untuk mendalami dugaan aset berupa tanah milik Andhi Pramono di Sumatera Selatan.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Andhi diduga menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya saat menjabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai. Kini, Andhi Pramono telah ditahan oleh pihak KPK pada Jumat 7 Juli 2023. ● han



FOTO: ANTARA

PEMERIKSAAN TERSANGKA KORUPSI TENDER PROYEK BASARNAS

Tersangka kasus korupsi tender proyek pengadaan peralatan di Basarnas pada periode 2021 - 2023 Roni Aidil berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/8). Dirut PT Kindah Abadi Utama tersebut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp88,3 miliar.

Jasa Raharja Beri Bantuan Cover Seat Kepada Operator Kapal Laut Oceana

JAKARTA (IM) - Jasa Raharja melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyerahkan bantuan cover seat kepada operator kapal laut Oceana. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Jasa Raharja kepada operator kapal laut.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang, melalui perwakilan manajemen Oceana Group Irwadi di Pelabuhan Domestik Harbour Bay, Batam, beberapa waktu lalu. Serah terima bantuan cover seat tersebut dihadiri oleh Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera Imam Hendrawan, Kepala Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau Mulyadi, dan sejumlah perwakilan dari Oceana Group sebagai penerima bantuan.

"Kiranya bantuan ini dapat membantu masyarakat lebih mengenal perlindungan Jasa Raharja. Khususnya bagi para penumpang kapal laut yang menggunakan jasa operator yang telah bekerja sama dengan kami," kata Munadi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

Ia mengatakan cover seat tersebut diserahkan dan dipasang di setiap bangku kapal Oceana-19 yang memiliki

rute pelayaran Harbour Bay Batam-Tanjung Balai Karimun dan sebaliknya. Dalam cover seat tersebut memuat pesan keselamatan, sehingga diharapkan dapat menjadi informasi sekaligus dipahami oleh setiap penumpang kapal laut yang menggunakan kapal itu.

"Dengan dipasangnya cover seat tersebut, dapat menjadi bentuk informasi jaminan perlindungan Jasa Raharja kepada tiap penumpang kapal tersebut," tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak hanya berkomitmen untuk menjalankan tugas memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum saja. Namun, pihaknya juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan bantuan dan manfaat kepada masyarakat sekitar.

"Salah satu program unggulan Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungan yaitu dengan melakukan Investasi sosial, dimana kami memberikan bantuan kepada mitra kerja Jasa Raharja yang dapat membawa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan," tutupnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PERESMIAN POS KONSULTASI HUKUM BAWASLU

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsuan Fuady (kanan) bersama Kepala Biro Hukum dan Humas Agung Bagus Gede Bhayu Indratmaja (tengah) dan Tenaga Ahli Hukum Bawaslu Kurniawan (kiri) meninjau ruang Pos Konsultasi Hukum di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/8). Bertepatan dengan Hari Konstitusi, Bawaslu meresmikan Pos Konsultasi Hukum bagi masyarakat untuk Pemilu 2024 dengan tema gotong royong dalam berkonstitusi dan berdedikasi.

Ketua MPR Bamsuet Kembali Usulkan Keberadaan Utusan Golongan di MPR

Wacana memasukkan utusan golongan di MPR sudah bergulir tahun lalu. Kini wacana tersebut kebalikan dimunculkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsuet kembali memunculkan wacana dalam keanggotaan MPR. Keberadaan utusan golongan penting sebagai bagian mewujudkan Konstitusi yang seutuhnya.

"Pemerintahan Indonesia semestinya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, wakil-wakil daerah, wakil-wakil golongan, yang merupakan perwujudan atau representasi dari kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat," kata Bamsuet dalam pidatonya di acara Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 MPR

RI, di Gedung MPR/DPR, Jumat (18/8).

"Hari ini kita kehilangan satu, yaitu utusan golongan," ujar Bamsuet.

Usulan itu disampaikan Bamsuet di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga hadir di acara tersebut. Bamsuet mengakui bahwa MPR tengah mendalami untuk bisa menghadirkan kembali utusan golongan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar punya alasan tersendiri mengapa utusan golongan layak dihadirkan kembali di MPR.

"(Yakni) Agar organisasi-organisasi keagamaan, agar wartawan, dokter dan profes-

profesi lain dan kelompok-kelompok lain masuk dalam konstitusi kita dan mampu bisa menyalurkan berbagai aspirasinya," katanya.

Bamsuet juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Menurutnya, hal itu sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

"Di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan melaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945," katanya.

Sebelumnya diberitakan, wacana memasukkan utusan golongan di MPR sempat bergulir tahun lalu. Hal ini terjadi saat Bambang Soesatyo mendapat masukan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk kembali memasukkan utusan golongan sebagai anggota MPR.

"Sebelum amandemen (konstitusi) keempat keang-

gotaan MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan," kata Bamsuet dalam keterangannya pada 2 Juli 2022.

Namun, setelah amandemen keempat, keanggotaan MPR hanya terdiri dari anggota DPR sebagai representasi partai politik dan anggota DPD sebagai representasi kepentingan daerah.

"Sedangkan utusan golongan dihapuskan," ujarnya.

Ia menyebut usulan itu tak hanya diterima dari Surya Paloh, tetapi juga berbagai kelompok lain. Seperti PP Muhammadiyah, PBNU (Pengu-

rus Besar Nahdlatul Ulama), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

"Kehadiran kembali utusan golongan dinilai akan menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, yang mengikutsertakan seluruh unsur dan elemen dalam masyarakat Indonesia," katanya.

Bamsuet berpandangan kehadiran utusan golongan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang tak terwakili oleh partai politik dan daerah. ● han

PT PNM Pastikan Telah Hapus Data Warga Garut yang Mendadak Punya Utang

GARUT (IM) - Data tagihan fiktif ratusan warga Kabupaten Garut yang mendadak memiliki utang beberapa waktu lalu telah dihapus. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

memastikan data warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, yang tidak pernah meminjam namun tiba-tiba berutang telah dibersihkan.

Corporate Secretary PT PNM L Dodot Patria Ary, menyebut jumlah warga yang data pribadinya dicatat lalu kemudian dibersihkan pada tagihan fiktif itu sebanyak 354 orang. Jumlah ini merupakan hasil verifikasi bersama antara internal PNM, masyarakat, pemerintah desa, hingga aparat kepolisian.

"Awalnya yang diadukan sebelumnya 407, setelah diverifikasi bersama menjadi 354. Jadi silakan bisa dibuktikan, bisa dilihat bahwa di sliik OJK yang paling valid, itu nama nasabah (warga yang dicatat) sudah tidak ada lagi," kata L Dodot Patria Ary di Garut, Jumat (18/8).

Meski begitu, ia tidak secara gamblang memaparkan apakah kasus ini telah dilaporkan pada aparat kepolisian atau tidak. L Dodot Patria Ary hanya memastikan jika PNM akan menaati proses hukum di kasus pinjaman fiktif yang membuat ratusan warga desa mendadak dapat tagihan itu.

"Jadi pada prinsipnya kami tetap akan taati proses hukum yang berlaku, kita hormati prosesnya dan akan kooperatif untuk sama-sama menjalin penanganan prosesnya," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun, PT PNM telah melaporkan kasus pinjaman fiktif yang mencatat ratusan warga Desa Sukabakti itu ke Polres Garut. Meski telah dilaporkan, jumlah kerugian

yang ditimbulkan belum final karena besaran pinjaman masing-masing warga yang dicatat bervariasi, yakni mulai Rp2 juta hingga Rp15 juta.

"Kerugian kita belum dihitung secara final, jadi nanti bisa ditunggu secara komprehensif, kira-kira berapa nilai yang bisa dipublish. Sebab kondisinya saat ini bisa bertambah atau berkurang," ujarnya.

Adanya kasus pinjaman fiktif di Garut, kata dia, akan memberikan pembelajaran terkait mekanisme pengawasan pada setiap pengajuan pada kemudian hari. L Dodot Patria Ary menegaskan PNM akan bertindak tegas jika ditemukan indikasi penyalahgunaan baik di internal maupun eksternal.

"Kemudian jika pun nanti ada indikasi katakanlah, saya pikir ini komitmen kami di awal untuk tetap tegas. Memberikan satu pembelajaran, bukan hanya di sisi internal tapi juga ke external," kata dia.

Sekretaris perusahaan PT PNM ini mengakui jika pinjaman fiktif tersebut dipicu oleh pandemi Covid-19, yang membuat pengawasan berkurang akibat kebijakan PPKM. Dari pengecekan yang dilakukan, kata dia, warga yang berutang namun tidak mengajukan pinjaman ini dimulai pada masa pandemi Covid-19.

"Pandemi membuat petugas tidak bisa leluasa melakukan pengecekan ke lapangan karena adanya kebijakan PPKM. Namun secara umum, dengan atau tanpa Covid-19, kami tetap kontinyu akan melakukan perbaikan, improvement, agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari," katanya. ● mei

Survei: Ganjar Pranowo Capres dengan Elektabilitas Tertinggi

JAKARTA (IM) - Survei Indikator mengungkap bahwa tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden (Capres) dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada Juli 2023.

"Ganjar 35,2%, Prabowo Subianto 33,2% dan Anies Baswedan 23,9%," kata Burhanuddin dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat (18/8).

Burhanuddin menyampaikan bahwa elektabilitas ini terpotret ketika Indikator

melakukan simulasi terhadap tiga nama. Dimana, ketiga nama tersebut hingga saat ini yang paling berpotensi maju sebagai Capres di 2024 mendatang.

Selain itu, kata dia, meskipun belum secara resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketiga tokoh ini di atas kertas sudah memiliki kendaraan politik.

Diketahui, Ganjar Pranowo telah diusung PDIP dan PPP, Prabowo Subianto diusung Gerindra PKB Golkar dan PAN, dan Anies Baswedan diusung Nasdem Demokrat dan PKS.



FOTO: ANTARA

DEKLARASI DUKUNGAN GANJAR PRANOWO DI PADANG

Sejumlah relawan meneriakkan yel-yel saat mengikuti deklarasi Ganjar Pranowo (GP2024) di Padang, Sumatera Barat, Jumat (18/8). Ratusan relawan yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 (PS2019), mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.